

MAKNA KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN YANG DIBUTUHKAN MENURUT ORANG MISKIN

MEANING OF POVERTY AND RESPONSE REQUIRED BY THE POOR

Arif Sofianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
email: areef_sofiant@yahoo.com

ABSTRACT

This study attempts to answer questions about: 1). How the meaning of poverty for poor people themselves, and how to understand why someone is poor, and 2). What policies had done to tackle poverty and how much success. This study used a qualitative approach. The location of this research is the Brebes Regency, Cilacap Regency and Wonosobo Regency. This study concludes that: 1). Poverty is defined as absolute poverty is the lack of income to make ends meet, the lack of ownership of resources and structural perspective is very limited access to jobs, capital, skills. 2). Various poverty alleviation programs and activities are less touched on the poor, many poverty alleviation activities enjoyed by not poor.

Keywords: *Poverty, income, policy*

PENDAHULUAN

Kemiskinan, sebagaimana disampaikan oleh Nasikun (2001), pada dasarnya dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan pemaknaan terhadap kondisi yang benar-benar kekurangan karena kekurangan input. Pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup secara layak. Bank Dunia serta PBB memiliki ukuran pendapatan orang miskin di bawah 1 (satu) Dollar Amerika Serikat per hari (\$1 USD/hari).

Kemiskinan relatif merupakan situasi dimana menurut ukuran kuantitatif kemiskinan absolut tidak miskin, namun jika dibandingkan dengan situasi sekitarnya, serta perubahan yang terjadi,

seorang mungkin dianggap miskin, atau rentan jatuh miskin. Kemiskinan relatif terjadi, bahwa sebenarnya banyak orang yang sesuai perhitungan kuantitatif tidak miskin, namun pada dasarnya menghadapi kemiskinan atau rawan miskin terhadap perubahan kondisi di sekitarnya. Akar masalah kemiskinan menurut konsep ini karena adanya ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup, oleh karena itu kemiskinan mempunyai banyak sisi, yaitu: ekonomi, sosial dan politik (Harris-White, 2005).

Kemiskinan kultural merupakan pandangan mengenai kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup atau perilaku hidup seorang individu, seperti malas, boros dan sebagainya. Kemiskinan mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas,

pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya struktur ekonomi maupun sosial yang menjadikan seseorang miskin, tidak memiliki akses dan kesempatan. Kemiskinan struktural adalah situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Pemaknaan kemiskinan tersebut di atas merupakan hasil dari studi di berbagai tempat dan pendekatan. Namun demikian, banyak makna lain mengenai kemiskinan dari berbagai pihak. Penelitian ini berusaha melakukan identifikasi makna kemiskinan dari sisi orang miskin sendiri.

Banyak hal yang mengakibatkan masyarakat menjadi miskin. Jika menggunakan pendekatan klasik, maka kemiskinan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif utama, yaitu kultural dan struktural. Sebab kemiskinan secara kultural karena perilaku dan sikap seseorang, kebiasaan, malas, tidak kreatif dan sebagainya, sehingga seseorang menjadi miskin meskipun orang lain dengan kesempatan yang sama tidak miskin. Di sisi lain, banyak orang sudah bekerja keras dan kreatif, serta berusaha maksimal, namun ada keterbatasan dan ketidakadilan yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hasil yang cukup. Kemiskinan yang dialami banyak orang secara komunal di suatu wilayah, menunjukkan struktur yang tidak adil tersebut sehingga sekelompok orang tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 memberikan peluang kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) untuk memberikan pelayanan publik yang lebih merata kepada masyarakat, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi pada sisi lain, model tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Orang miskin banyak dijadikan objek bukan sebagai subjek, orang miskin lebih dieksploitasi sebagai komoditas politik oleh para penguasa dan calon penguasa dari pusat sampai penguasa daerah, namun kenyataannya dari waktu ke waktu penanganan penduduk miskin masih tetap menjadi masalah. Fenomena ini bisa dilihat dan dicermati di seluruh pelosok Indonesia. Orang miskin tidak diberdayakan, pemerintah selalu menciptakan kebijakan penanganan orang miskin dengan menciptakan ketergantungan, bukan menciptakan pemberdayaan.

Sesuai dengan data BPS, tercatat pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 20,43%, kemudian turun menjadi 19,23% pada tahun 2008 dan turun kembali menjadi 17,72% tahun 2009. Pada tahun 2010 kembali turun menjadi 16,56%, namun kembali naik pada tahun 2011 menjadi 16,21%. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama Maret 2011 – September 2011, Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 3,74 persen, yaitu dari Rp.209.611,00 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp. 217.440,00 per kapita per bulan pada September 2011.

Dari data di atas, kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi persoalan strategis untuk diatasi. Tentunya hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengurangi

kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Sebagaimana disebutkan di atas, secara nasional telah ada skema penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga ini menjadi modal dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, ada beberapa program yang metode pelaksanaan maupun sasarannya kurang tepat pada subjek penderita kemiskinan, dan kadang terjadi saling tumpang tindih, sehingga agenda penanggulangan kemiskinan kurang efektif. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya sinkronisasi penanggulangan kemiskinan di daerah melalui optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Kendala penanggulangan kemiskinan lainnya adalah kurang sesuainya program-program tersebut dengan kondisi masyarakat miskin. Contohnya yang dibutuhkan masyarakat miskin adalah lapangan pekerjaan dan berkurangnya beban pengeluaran, namun pemerintah memangkas subsidi BBM dan menggantinya dengan BLSM. Kebanyakan permasalahan kemiskinan dipandang dari sudut penentu kebijakan, menurut rumus dan teori yang kadang tidak sesuai samasekali dengan kondisi dan kebutuhan orang miskin. Banyak program-program kemiskinan dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif belaka, pertimbangan teknokratis dan akademis yang jauh dari kenyataan kemiskinan yang ada di masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga seringkali disamaratakan, padahal karakteristik kemiskinan yang berbeda daerah atau berbeda kelompok juga berbeda pula kondisinya dan kebutuhannya. Misalnya di satu desa yang kebanyakan pengrajin atau pedagang yang dibutuhkan adalah simpan pinjam, namun untuk pertanian adalah bantuan sarana

pertanian, sedangkan program PNPM Mandiri menyamaratakan dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Di sisi kewenangan, kadang antar lembaga juga saling berlomba, tidak bekerjasama sehingga yang muncul adalah ego sektoral dan ego lembaga. Hal ini tentu merupakan pemborosan sumberdaya negara dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Memperhatikan uraian diatas, ada kesenjangan antara apa yang diharapkan orang miskin dan apa yang diberikan pemerintah. Hal ini mempengaruhi efektifitas penanggulangan kemiskinan selama ini, sehingga kemiskinan masih menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) harus dipertemukan. Orang miskin perlu menjadi subjek dari penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan orang miskin dan bagaimana mengembangkan model penanganannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk melakukan eksplorasi mengenai kondisi yang dihadapi orang miskin serta pandangan terhadap program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta melihat makna kemiskinan menurut masyarakat miskin itu sendiri, mencari sebab-sebab kemiskinan, dan alternatif kebijakan yang diinginkan masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Wonosobo. Informan dalam penelitian ini ialah warga miskin masing-masing 50-60 individu rumah tangga miskin yang ada di wilayah RT/RW, Desa dan Kecamatan. Informan lainnya terdiri dari aparat pemerintah kabupaten yang terkait dengan

penanggulangan kemiskinan, yaitu Bappeda dan Bapermasdes, aparat Kecamatan (Sekcam, Kasi Kesra), aparat Desa (Kades, Sekdes, Kaur Kesra). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara mendalam terhadap informan kunci serta wawancara sederhana untuk responden. Analisis yang digunakan ialah analisis kontekstual, memahami kondisi sesuai dengan konteksnya.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Alokasi dana penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini dibagi menjadi 4 klaster utama. Klaster pertama adalah memberikan bantuan langsung untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau mengurangi beban pengeluaran orang miskin seperti BLT/BLSM, Raskin, dan Jamkesmas. Klaster kedua adalah berbasis pemberdayaan untuk menjadikan orang

miskin produktif seperti PNPM Mandiri. Klaster ketiga adalah meningkatkan kapasitas produksi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster keempat adalah perbaikan infrastruktur seperti perumahan, transportasi, air, listrik dan gas yang bisa didapatkan dengan harga murah.

Pemerintah Pusat telah mengucurkan berbagai macam bantuan kepada warga miskin yang fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bantuan konsumsi seperti Raskin dan BLT lebih banyak berorientasi pemenuhan kebutuhan sesaat yang kurang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan karena bersifat sementara dan tidak produktif. Di sisi lain program yang menonjolkan sisi produktif kurang leluasa diakses masyarakat dan keterbatasan karena harus menggunakan jaminan. Sehingga tidak semua orang miskin yang membutuhkan bisa mengaksesnya. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan komposisi penerima bantuan.

Tabel 1
Jenis Bantuan yang Diterima Oleh Orang Miskin

No	Bantuan	Persentase
1	Raskin	46.0
2	Jamkesmas	18.7
3	BLT	16.5
4	PKH	7.2
5	Lainnya, renovasi rumah, modal, dll	6.8
6	Tidak mendapat bantuan	4.7
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Jenis bantuan yang telah diterima oleh sebagian besar responden tersebut merupakan paket bantuan pemerintah bagi kalangan miskin dengan level paling rendah. Namun bantuan tersebut sifatnya hanya temporal dan kurang memberikan pengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup. Jenis bantuan yang lebih diperlukan sesungguhnya adalah perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja,

sehingga warga miskin mampu memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Memahami karakter kemiskinan merupakan kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah. Secara umum terdapat karakter yang eksplisit seperti pekerjaan dan pendapatan, konsumsi, serta karakter implisit seperti

pola pikir, budaya dan perilaku sehari-hari. Karakter secara eksplisit orang miskin seringkali menjadi acuan, dan memang kondisi tersebut sangat jelas berbeda jauh dengan masyarakat yang tidak miskin.

Secara umum, orang miskin menghadapi persoalan pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan pokok. Oleh karena sedikitnya penghasilan, maka penggunaan dana atau keuangan keluarga sebagian besar untuk konsumsi. Tabel 2 di bawah ini menyajikan data penggunaan uang dalam keluarga miskin yang menjadi informan.

Tabel 2
Penggunaan Uang Dalam Rumahtangga Miskin

No	Penggunaan uang	Persentase
1	Makan	47,73
2	Keperluan rumah tangga lainnya	26,09
3	Biaya sekolah	13,52
4	Biaya kesehatan	6,48
5	Lainnya	6,18
Jumlah		100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Sesuai dengan data Tabel 2 di atas, terlihat bahwa penggunaan uang dalam rumahtangga miskin memang sebagian besar untuk keperluan konsumsi atau makan sehari-hari, itupun dengan standar yang minim. Mereka tidak memiliki cadangan uang untuk keperluan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, peningkatan penghasilan sangat dibutuhkan oleh responden dibandingkan dengan bantuan kebutuhan sehari-hari.

B. Makna Kemiskinan

Menurut orang miskin, kemiskinan dimaknai secara absolut, yaitu kemiskinan lebih banyak dimaknai karena tiadanya sumberdaya yang memadai untuk memenuhi kehidupan yang layak secara ekonomis. Sesuai dengan data eksplorasi mengenai pemaknaan kemiskinan dari responden, terdapat 7 (tujuh) pengertian utama mengenai kemiskinan yaitu:

1. Miskin dimaknai sebagai “tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari”;
2. Miskin dimaknai “tidak mempunyai apa-apa”;
3. Miskin dimaknai “tidak punya pekerjaan/kurangnya lapangan pekerjaan”;
4. Miskin dimaknai “kurang pendidikan/ketrampilan”;
5. Miskin dimaknai “penghasilan lebih kecil dari kebutuhan”;
6. Miskin dimaknai “serba kekurangan/sengsara”; dan
7. Miskin dimaknai “golongan masyarakat bawah/sengsara”.

Sebagian besar responden memberikan makna kemiskinan sebagai “penghasilan lebih kecil dari kebutuhan”, kemiskinan merupakan kondisi kurangnya input. Secara jelas makna kemiskinan menurut responden dapat dilihat seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Makna Kemiskinan Menurut Masyarakat Miskin

No	Pengertian kemiskinan	Persentase
1	Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan	29.3
2	Serba kekurangan/ sengsara	19.2
3	Tidak mempunyai apa-apa	13.5
4	Kurang pendidikan/ ketrampilan	13.5
5	Tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari	10.0
6	Tidak punya pekerjaan/ kurangnya lapangan kerja	10.0
7	Golongan masyarakat bawah/ sengsara	4.4
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Sesuai dengan data pada Tabel 3, maka pemaknaan tersebut lebih condong kepada kemiskinan absolut, dengan sebab-sebab struktural. Kemiskinan dimaknai sebagai kondisi kekurangan sumberdaya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mempunyai apa-apa, kurangnya penghasilan serta serba kekurangan atau sengsara.

Dari segi penyebabnya, kemiskinan dimaknai dalam konteks struktural, yaitu karena kurangnya akses terhadap sumberdaya. Sebanyak 13,5% responden menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kurangnya akses terhadap pendidikan dan ketrampilan, serta akses terhadap pekerjaan (10%).

C. Sebab Kemiskinan

Pandangan responden mengenai penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan dari perspektif struktural, dan sedikit memandang dari perspektif kultural. Dari tiga daerah yang dijadikan sampel maka bisa dikelompokkan menjadi tujuh alasan mengapa mereka menjadi

miskin. Alasan mereka menjadi miskin disebabkan oleh:

1. Penghasilan mereka minim akibat krisis ekonomi dan harga menjadi mahal.
2. Mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kadang mendapatkan penghasilan kadang tidak.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan dan modal untuk berusaha sehingga mereka menjadi miskin.
4. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah mengakibatkan mereka menjadi miskin.
5. Adanya kelemahan/keterbatasan fisik mengakibatkan mereka menjadi miskin.
6. Mereka miskin karena orang tuanya dahulu miskin, sehingga mereka kadang tidak mendapatkan bagian warisan.
7. Mereka miskin karena nasib.

Dari ketujuh kelompok sebab seseorang miskin yang paling tinggi adalah mereka miskin akibat kurangnya lapangan kerja dan modal, sedangkan secara keseluruhan akibat dia miskin bisa dilihat seperti pada Tabel 4.

Tabel 4
Sebab Kemiskinan

No	Penyebab kemiskinan	Persentase
1	Kurangnya lapangan kerja/ modal	33.2
2	Kurang pendidikan/ ketrampilan	25.0
3	Penghasilan minim/ krisis ekonomi/ harga mahal	15.0
4	Tidak punya pekerjaan tetap	14.5
5	Keterbatasan fisik	6.4
6	Keturunan/ faktor keluarga	4.5
7	Nasib	1.4
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Sesuai dengan jawaban responden di atas, ternyata sebagian besar responden menyatakan penyebab kemiskinan karena kendala struktural, dimana mereka kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sebagian besar responden menyatakan kemiskinan karena keterbatasan struktur dan kebijakan negara, yaitu: (1) penghasilan mereka minim akibat krisis ekonomi dan harga menjadi mahal; (2) mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kadang mendapatkan penghasilan kadang tidak; (3) kurangnya lapangan pekerjaan dan modal untuk berusaha sehingga mereka menjadi miskin, dan (4) tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah mengakibatkan mereka menjadi miskin. Kemiskinan diakibatkan karena struktur ekonomi, politik, hukum dan sosial yang membuat mereka hanya memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi.

Sementara sebagian kecil (12,3%) responden memandang kemiskinan karena persoalan non-struktural, yaitu persoalan kelemahan individu. Kemiskinan disebabkan karena kondisi lemahnya

seorang individu, yaitu: (1) adanya kelemahan/keterbatasan fisik mengakibatkan mereka menjadi miskin; (2) mereka miskin karena orang tuanya dahulu miskin, sehingga mereka kadang tidak mendapatkan bagian warisan, dan (3) mereka miskin karena nasib. Kemiskinan disebabkan karena kelemahan individu itu sendiri baik secara fisik maupun mental sehingga tidak bisa melakukan aktivitas produktif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persoalan kemiskinan sebagian besar memang karena kendala struktural. Meskipun demikian ada batasan kultural dan kelemahan individu yang menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, mengenai daya tahan warga miskin terhadap tekanan, dapat dilihat dari cara mereka menutup kekurangan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara berhutang, dan sedikit orang yang melakukan penghematan. Cara menutup kekurangan kebutuhan dapat dilihat seperti pada Tabel 5.

Tabel 5
Cara Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan

No	Cara memenuhi kekurangan	Persentase
1	Berhutang saudara, tetangga, warung	70.3
2	Bekerja lebih giat/ mencari tambahan penghasilan	25.7
3	Menghemat/ mengurangi pengeluaran	4.0
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Berdasarkan data di atas, cara yang paling populer adalah menambah beban, artinya mencari pinjaman yang harus dicari gantinya, bahkan kadang lebih besar di kemudian hari. Hanya sedikit orang yang melakukan cara-cara produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya tahan dengan mengurangi pengeluaran jauh lebih sedikit lagi. Oleh sebab itu, penduduk miskin sangat rentan untuk jatuh lebih dalam pada kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya akses terhadap

lapangan kerja dan kapasitas, di sisi lain tekanan kebutuhan hidup tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan sebagian besar responden bahwa kesulitan utama yang mereka hadapi karena minimnya akses terhadap pekerjaan. Kesulitan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas diakibatkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak adanya pekerjaan tetap, dan penghasilan menjadi minim seperti terlihat dalam Tabel 6.

Tabel 6
Kesulitan Utama Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan

No	Kesulitan utama	Persentase
1	Sulitnya lapangan kerja/ tidak bekerja	51.6
2	Tidak punya pekerjaan tetap	20.1
3	Upah yang minim/ penghasilan tidak pasti	13.7
4	Kurangnya pendidikan/ ketrampilan	10.8
5	Keadaan fisik: tua, cacat	3.8
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana membuka akses yang luas terhadap lapangan pekerjaan. Kebijakan perlindungan sosial terutama kebutuhan sehari-hari sangat temporer dan tidak menjadi solusi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan dalam jangka

waktu panjang. Masyarakat miskin sebagian besar berharap mendapatkan bantuan untuk pekerjaan dan permodalan sedangkan yang menginginkan bantuan berwujud barang tidak terlalu besar. Jenis bantuan yang diharapkan seperti pada Tabel 7.

Tabel 7
Bantuan yang Diharapkan

No	Yang diharapkan	Persentase
1	Lapangan pekerjaan dan permodalan	48.3
2	Bantuan sembako, pendidikan, kesehatan, dsb.	31.8
3	Berusaha lebih keras/ mandiri	16.9
4	Apatis, tidak punya semangat	3.0
Jumlah		100.0

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas, bahwa makna kemiskinan, sebab dan penanggulangannya lebih banyak dipandang dari perspektif struktural, dalam hal ini sejalan dengan konsep kemiskinan dalam kerangka teori Sosial Demokrat. Kemiskinan lebih disebabkan oleh produk kebijakan, produk politik, produk ekonomi dan produk sosial dalam bingkai masyarakat dan negara. Kemiskinan bukan karena keterbatasan individu semata, namun karena ada struktur yang membuat mereka terbatas aksesnya terhadap sumber-sumber penting dari kehidupan.

Kemiskinan bukan dipandang karena kelemahan individu semata, bukan juga dipandang karena perilaku semata, namun yang lebih dominan adalah kemiskinan dilihat dari aspek eksternal, dalam hal ini struktur ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan juga bukan hanya masalah pendapatan atau aspek ekonomi semata yang identik dengan pendapatan yang rendah, melainkan juga menyangkut masalah keterbatasan akses pada aset produktif, rendahnya pembangunan manusia dan sebagainya.

Kemiskinan dalam perspektif ini bukan hanya dipandang secara ukuran kuantitas, seperti pendapatan dan konsumsi, namun dipandang lebih luas, selain pendapatan, juga akses, keterkucilan dan sebagainya yang bersifat relatif. Penyebab kemiskinan menurut konsep sosial demokrat adalah adanya ketimpangan struktur ekonomi dan politik

serta ketidakadilan sosial yang melanda masyarakat miskin. Kemiskinan terjadi karena tidak meratanya sumber-sumber terdistribusi. Sebagian besar sumber, baik ekonomi, sosial, dan politik hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Kondisi demikian merupakan sebuah akibat dari struktur yang tidak adil yang tercipta karena sistem ekonomi neo-liberal.

Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif. Penanggulangan kemiskinan selain melalui hal-hal teknis seperti program dan kegiatan, secara filosofis harus diikuti dengan distribusi yang adil. Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan penyaluran pendapatan dasar secara universal, adanya perubahan fundamental dalam pola-pola distribusi pendapatan melalui intervensi pendapatan yang dilakukan oleh negara. Maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan, prinsip yang digunakan adalah redistribusi pendapatan vertikal dan horisontal yang dilakukan melalui aksi kolektif, dalam hal ini negara sebagai instrumen terdepan.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Makna Kemiskinan

Masyarakat miskin mempunyai pemaknaan tersendiri yang cukup sederhana, dan hampir seluruh pemaknaan kemiskinan mengarah pada *kemiskinan*

absolut yaitu kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup, kurangnya pemilikan sumberdaya dan perspektif struktural, yaitu serba terbatas aksesnya terhadap pekerjaan, permodalan dan keterampilan. Sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat miskin tersebut.

Sesuai dengan kondisi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat menjadi miskin karena kurangnya kesempatan mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai untuk mendatangkan penghasilan yang cukup. Penyebab berikutnya adalah karena kurangnya keterampilan atau kapasitas sehingga kurang mampu mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat. Masyarakat miskin lebih suka diciptakan pekerjaan bagi mereka dan ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberian ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari pada diberi bantuan langsung.

2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Telah banyak agenda penanggulangan kemiskinan namun masih sektoral, parsial dan sementara, serta lebih berorientasi pada terlaksananya proyek semata. Pemerintah sudah banyak mengalokasikan sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah melalui satuan kerja sesuai sektor telah mengalokasikan berbagai sumberdaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Namun alokasi dana tersebut belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dana penanggulangan kemiskinan sangat bias, banyak dana kemiskinan yang dinikmati oleh bukan orang miskin sehingga orang miskin tetap hanya sebagai obyek.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mampu memberikan akses, sumberdaya dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Peran pemerintah diperlukan dalam rangka membuka kesempatan dan akses masyarakat terhadap peningkatan kapasitas, lapangan kerja dan perlindungan sosial lainnya. Warga miskin perlu diciptakan pekerjaan bagi mereka dan ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberian ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari pada diberi bantuan langsung, maka penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari membuka kesempatan orang miskin mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kemampuan mereka melalui berbagai program yang sistematis.
2. Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah diarahkan pada terciptanya kemandirian bagi diri si miskin dengan teknik pelaksanaan yang terintegrasi secara baik, antar sektor maupun antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harris-White, B. (2005). *Destitution And Poverty of Its Politics-With Special Reference To South Asia*. World Development 33:881-891.
- Nasikun (2001). *Isu Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, MAP UGM.

Basis Data Tanpa Penulis

- Biro Pusat Statistik. (2007). *Berita Resmi Statistik. Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007*.